



Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan KPP Bea Cukai X

Valentina Amalia Putri¹, Mochammad Ilyas Junjuna^{*2}, Binti Shofiatul Jannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding author: mij@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka COSO pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai X dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di tengah maraknya kasus penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara sehingga penting diterapkannya sistem pengendalian intern yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi melalui tahap pengumpulan, produksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kerangka COSO digunakan sebagai acuan dalam analisis lima komponen pengendalian intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan Bea Cukai diperlukan untuk pengembangan metodologi penelitian yang komprehensif untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian intern dan dampaknya terhadap kualitas, keandalan, dan transparansi laporan keuangan di lingkungan instansi Bea Cukai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Bea Cukai X telah melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan kerangka COSO, dengan mengembangkan mekanisme pengawasan yang sistematis dan komprehensif.

Kata Kunci: Sistem pengendalian intern; COSO; laporan keuangan

Abstract

This study aims to analyze the application of the internal control system based on the COSO framework at the X Customs Supervision and Service Office in an effort to improve the quality of financial statements in the midst of rampant cases of smuggling illegal goods that harm the state so it is important to implement a comprehensive internal control system. The research method used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation through the stages of collection, data production, data presentation and conclusion drawing. The COSO framework is used as a reference in analyzing five internal control components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Evaluation of the implementation of the internal control system on the quality of Customs and Excise financial reports is necessary for the development of a comprehensive research methodology to measure the effectiveness of the internal control system and its impact on the quality, reliability and transparency of financial reports within the Customs and Excise. The results showed that X Customs Supervision and Service Office has implemented internal control in accordance with the COSO framework, by developing a systematic and comprehensive monitoring mechanism.

Keywords : Internal control system; COSO; financial statement

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri melalui pengawasan terhadap arus masuk-keluar barang. Dalam laporan terbaru DJBC, berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang senilai Rp 49 miliar dalam satu minggu pada bulan November 2024, dengan total penindakan mencapai 283 kasus. Komoditas yang diselundupkan antara lain garmen, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras dan narkoba. Jumlah penindakan terkait penyelundupan barang ini meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 31.275 kasus (Estherina, 2024). Tingginya angka penyelundupan ini mengakibatkan potensi kerugian negara yang signifikan terkait ekspor impor terutama dalam penerimaan perpajakan (Kurniawan & Firdiansyah, 2022). Cukai merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor Bea Cukai melalui pembebanan pajak pada rokok (Beri, 2022). Rokok seringkali menjadi objek penyembuhan dan produksi ilegal tanpa pita cukai mengingat perokok aktif yang semakin meningkat tiap tahunnya. Maraknya kasus penyelundupan tersebut diperlukan adanya penerapan sistem pengendalian internal demi meminimalisir potensi kehilangan pendapatan akibat praktik ilegal tersebut. Selain itu, tantangan lain juga dihadapi Bea Cukai, yaitu maraknya kasus gratifikasi di antara masyarakat dan pegawai di lingkungan kerja Bea Cukai. Kasus-kasus tersebut dapat menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya urgensi penguatan sistem pengendalian intern yang komprehensif. Sistem pengendalian intern bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga merupakan mekanisme fundamental untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin kualitas laporan keuangan. Keberadaan sistem pengendalian intern menjadi kunci strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Adanya kasus penyelundupan tersebut tidak hanya bertambah pada kerugian finansial negara tetapi juga berdampak pada sistem ekonomi dan tata kelola pemerintah. Setiap kasus penyelundupan yang tidak terdeteksi pada sistem pengendalian intern menimbulkan celah sistematis dalam mekanisme pengawasan yang pada akhirnya dapat mengurangi integritas instansi dan merusak kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah (Laksana et al., 2019). Kerugian negara akibat adanya tindakan penyelundupan tidak hanya terhitung dari nilai barang yang tidak melewati prosedur Bea Cukai, melainkan juga mencakup biaya penegakan hukum, potensi hilangnya pendapatan pajak, serta risiko gangguan pada perdagangan nasional (Awallya et al., 2023). Sistem pengendalian intern menjadi instrumen krusial dalam mitigasi risiko penyelundupan dan menjamin integritas laporan keuangan Bea Cukai. Implementasi kerangka COSO memungkinkan instansi untuk membangun sistem berlapis yang tidak hanya berfokus pada deteksi, tetapi juga pencegahan dan koreksi dalam operasional. Setiap komponen pengendalian intern, mulai dari lingkungan pengendalian yang menciptakan budaya kepatuhan, penilaian risiko yang komprehensif terkait operasional, aktivitas pengendalian yang terukur, sistem informasi dan komunikasi yang transparan dan persepsi penggunaan berfokus pada tingkat keyakinan pengguna bahwa penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja (Junjunaan et al., 2021), hingga mekanisme pemantauan yang berkelanjutan secara simultan berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi penyimpangan.

Kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) merupakan model yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Kerangka ini menjadi acuan global dalam pengendalian internal. Kerangka COSO dijabarkan melalui 5 prinsip komponen pengendalian yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) aktivitas pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) aktivitas pemantauan (Fathah, 2019). Pada instansi di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, kerangka kerja penerapan sistem pengendalian internal ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 yang disusun melalui pendekatan sistematis dan komprehensif dan didukung oleh komitmen pimpinan melalui integrasi, regulasi, struktur, sumber daya dan proses. Dampak pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan sangat signifikan. Laporan keuangan yang andal dan transparan merupakan

refleksi dari efektivitas pengendalian intern suatu organisasi (Alminanda & Marfuah, 2018). Melalui mekanisme pengawasan pada sistem yang ketat, instansi dapat meminimalisasi risiko terkait kesalahan pencatatan, manipulasi data, contoh praktik-praktik yang dapat melemahkan akuntabilitas keuangan. Sistem pengendalian intern tidak hanya sekedar alat verifikasi, tetapi juga berperan sebagai mekanisme dalam memastikan setiap kegiatan organisasi, termasuk transaksi keuangan tercatat dengan akurat, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nasution et al., 2019).

Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan serta akuntabilitas suatu entitas pada periode tertentu, perusahaan maupun instansi pemerintah. Dalam instansi pemerintah, laporan keuangan memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan. Selain menjadi bentuk dokumentasi atas penggunaan anggaran, laporan keuangan pemerintah juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya (Hanun & Ningrum, 2024). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan dalam instansi pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan kumpulan prinsip akuntansi yang wajib diterapkan oleh instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh entitas pelaporan yang ditetapkan. Laporan tersebut bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP, diharapkan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memadai sehingga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara (Gasperz, 2019).

Dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pengawasan intern pemerintah sebagai manajemen sangatlah penting dalam memastikan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Lemahnya sistem pengendalian intern dalam instansi pemerintah dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan serta pengawasan kegiatan operasional. Tanpa adanya pengendalian intern yang efektif, berbagai bentuk pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi secara tepat waktu. Sehingga dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan beserta pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lemahnya sistem pengendalian intern dalam instansi pemerintah dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan serta pengawasan kegiatan operasional. Menurut Riyanita & Widiastuti (2020), semakin baik implementasi sistem pengendalian internal pada suatu instansi maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik pula. Tanpa adanya pengendalian intern yang efektif, berbagai bentuk pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi secara tepat waktu. Sehingga dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan beserta pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hakim & Purnamawati (2022), penerapan sistem pengendalian internal dapat menunjang efektivitas pemberian kredit apabila dilaksanakan secara optimal. Hal ini selaras dengan Rahmany dan Fatimah (2020), bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan sesuai persyaratan pada PP No. 60 tahun 2008 terbukti mendukung efektivitas penerapan dan pemantauan yang mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. KPP Bea Cukai X merupakan bagian dari Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem penilaian internal dalam KPP Bea Cukai X. Peran sistem pengendalian internal di KPP Bea Cukai X menjadi krusial dalam menjaga integritas dan keandalan laporan

keuangan yang dihasilkan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengawasan peredaran barang kena cukai tercermin dalam realisasi pendapatan perpajakan dalam laporan keuangan Bea Cukai. Jika pengendalian terhadap barang ilegal lemah, maka realisasi penerimaan negara dapat mengalami penyimpangan dari target anggaran sehingga dapat mempengaruhi relevansi dan keandalan laporan keuangan dan mengakibatkan adanya ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan (Alfani & Firmansyah, 2018). Sistem pengendalian intern Bea Cukai, harus memastikan bahwa prosedur pengawasan berjalan efektif, mulai dari mensosialisasikan kepatuhan pembayaran kita cukai, pemantauan pelaksanaan peraturan hingga penegakan hukum, sehingga tidak hanya menjaga integritas laporan keuangan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas publik (Junjuran et al., 2020). Pada penelitian Alfani & Firmansyah (2018), menunjukkan bahwa penerapan sistem pelayanan impor dokumen BC 2.5 di lingkungan KPPBC Bekasi sudah memiliki standar internasional yang baik namun terdapat kelemahan terkait sistem penempatan pegawai, kecakapan pegawai rekonsiliasi data, dan update database yang masih manual berakibat pada tingkat akurasi data yang berkurang. Pada penelitian Simorangkir & Firmansyah (2017), pada penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPP Bea Cukai) Tipe Madya X memiliki pengurusan perizinan impor sementara yang baik namun terdapat prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga terjadi sedikit kekurangan dalam penatausahaan atau administrasi dokumen antara lain pada saat penomoran dan pengarsipan dokumen. Selain itu terdapat aktivitas pengendalian internal yang belum sepenuhnya dilaksanakan seperti belum terdapat jaminan bahwa pengawasan dan pengenalan pengendalian fisik dalam pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi sistem pengendalian intern pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea Cukai X. Penelitian ini menghadirkan pendekatan komprehensif dalam menganalisis sistem pengendalian intern melalui kerangka COSO. Urgensi terkait pemahaman mendalam mengenai mekanisme pencegahan tindak penunjukan di tengah celah kelemahan sistem pengendalian intern. Hipotesis yang diajukan yaitu bahwa penerapan sistem pengendalian intern berbasis kerangka COSO dapat meningkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memperkuat akuntabilitas KPP Bea Cukai X. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa sistem pengendalian intern yang struktur dapat memenuhi prosedur administratif, mencegah praktik korupsi, mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yaitu metode yang bersifat interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Metode pendekatan kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat permasalahan untuk di generalisasikan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian fenomena yang kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Rusandi & Rusli, 2017). Karakteristik dari deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan bukan angka seperti penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengendalian internal yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas laporan keuangan di lingkungan KPP Bea Cukai X. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi pengelola keuangan di instansi terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan KPP Bea Cukai X melalui kerangka COSO. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada evaluasi komprehensif lima komponen utama

pengendalian intern dengan menguraikan praktik-praktik pengendalian yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi sistem, serta memetakan potensi pengembangan kedepannya dalam upaya meminimalisasi risiko.

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan COSO, lingkungan pengendalian mencakup sikap nilai dan tindakan manajemen serta dewan pengawas yang membangun dasar bagi pengendalian intern yang berfungsi untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap pengendalian intern di seluruh organisasi (Permata & Dethan, 2021). Pada KPP Bea Cukai X telah menerapkan lingkungan pengendalian yang baik dengan menanamkan pembagian tugas dan kewajiban di setiap pegawai secara tegas dan pelaksanaan kegiatan mengikuti SOP yang berlaku. KPP Bea Cukai X memberlakukan pemisahan tugas antara bagian pencatatan, otorisasi dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai oleh Sub Bagian Umum, Seksi Kepabeanan dan Cukai, dan Seksi Perbendaharaan, serta penggunaan aplikasi CIESA 4.0 (Custom-Excise Information System and Automation) untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko meliputi penentuan risiko di semua aspek organisasi yang dievaluasi serta dipertimbangkan untuk memastikan bahwa bagian organisasi bekerja secara baik (Permata & Dethan, 2021). Penilaian risiko yang dilakukan KPP Bea Cukai X yaitu terkait potensi adanya gratifikasi. Gratifikasi secara langsung dapat mengganggu kualitas laporan keuangan melalui manipulasi data keuangan dan pelanggaran standar akuntansi. Hal tersebut menggambarkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal pada organisasi sehingga perlu diterapkan pengawasan yang ketat dan kebijakan anti gratifikasi serta penerapan sistem komunikasi dan informasi berbasis transparansi. Risiko gratifikasi di KPPBC TMC X cukup tinggi sehingga pihak terkait berusaha merespon risiko dengan melakukan pengawasan dan memitigasi risiko tersebut melalui saluran pengaduan dan whistleblowing system Kemenkeu yang dikelola oleh Seksi Kepatuhan Internal di KPP Bea Cukai X.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk memastikan bahwa arahan dari manajemen dapat dilaksanakan dengan baik (Rahmany & Fatimah, 2020). KPP Bea Cukai X merupakan instansi Bea Cukai Tipe Madya Cukai (TMC), sehingga mayoritas kegiatannya berpusat pada pengawasan dan pelayanan pita cukai rokok. Fokus khusus pada pengawasan peredaran rokok tanpa pita Cukai dilakukan melalui pemetaan wilayah berisiko tinggi di sekitar wilayah produksi rokok dan hasil tembakau. Pengawasan juga dilakukan dengan kerjasama bersama aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Penindakan tegas juga dilakukan kepada pelaku pengedar dengan dikenakan denda sebesar 3 kali nilai Cukai yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1x24 jam. Jika benda yang belum terbayar pada waktu ditentukan, maka pengedar rokok ilegal akan diteruskan melalui jalur pidana.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi di KPP Bea Cukai X belum dikembangkan sesuai dengan implementasi COSO. Kekurangan sistem informasi terkait website instansi yang berisi mengenai informasi dan prosedur terkait Bea Cukai belum bisa dijangkau oleh masyarakat. Namun, KPP Bea Cukai X menyediakan saluran yang tersedia pada akun sosial media resmi dan nomor WhatsApp resmi. Saluran komunikasi berbasis pesan instan dapat memudahkan masyarakat dan pihak kepentingan berinteraksi dengan Bea cukai. Mekanisme dan konsultasi terintegrasi pada Seksi Kepatuhan Internal selaku bagian dari pengendalian intern Bea Cukai.

5. Aktivitas Pemantauan

Aktivitas pengendalian merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk memastikan bahwa arahan dari manajemen dapat dilaksanakan dengan baik (Siregar & Sibarani, 2023). Aktivitas pemantauan pada KPP Bea Cukai X telah dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan atas tanggung jawab Seksi Kepatuhan Intern sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Bea Cukai melalui pengawasan yang dilakukan secara

berkala dan audit internal yang berkelanjutan. Namun masih diperlukan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan risiko keuangan Bea Cukai.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan uraian analisis sistem pengendalian intern pada KPP Bea Cukai X melalui penerapan kerangka COSO adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa KPP TMC Bea Cukai X telah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Manajemen telah menunjukkan komitmen dengan integritas dan nilai etika melalui kebijakan intern. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas. Dalam penilaian risiko, KPP TMC Bea Cukai X telah melakukan proses identifikasi risiko secara efektif. Penanganan yang dilakukan melalui serangkaian pemantauan yang sistematis sehingga dapat mengurangi risiko akibat potensi penyimpangan dan kerugian negara. Aktivitas pengendalian pada KPP TMC Bea Cukai X menunjukkan adanya efektivitas dalam pengawasan yang ketat. Pengawasan secara berkala dan pemetaan wilayah beresiko tinggi dapat memaksimalkan pengendalian intern dan mengurangi potensi peredaran rokok tanpa pita cukai.

Sistem informasi dan komunikasi di KPP Bea Cukai X masih tergolong minim. Kurang adanya website yang dapat dijangkau oleh masyarakat, mengakibatkan kurangnya literasi masyarakat sekitar mengenai tugas dan wewenang Bea Cukai. Walaupun demikian, KPP TMC Bea Cukai X menyediakan saluran pengaduan yang dapat digunakan masyarakat sehingga masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pihak internal Bea Cukai. Pada aspek pemantauan, kegiatan pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan secara berkala. Hasil pemantauan juga ditindak lanjut secara cepat dan efisien. Pelanggaran kepatuhan kode etik ditangani secara cepat dan pemberian sanksi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kesimpulan akhir pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan KPP TMC Bea Cukai X memiliki kontribusi positif dalam mendukung kinerja organisasi Bea Cukai walaupun belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan atau pengembangan, organisasi menunjukkan adanya komitmen kuat untuk melakukan kontribusi secara berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern.

KETERBATASAN & SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pertama, lingkup penelitian hanya terfokus pada satu unit kerja spesifik yaitu KPP Bea Cukai X, sehingga temuan yang diperoleh mungkin kurang dapat digeneralisasikan untuk seluruh unit kerja Bea Cukai di Indonesia. Kedua, proses pengumpulan data dalam penelitian sangat bergantung pada persepsi dan perspektif subjektif dari responden yang terbatas sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi hasil. Ketiga, rentang waktu penelitian yang relatif singkat menjadi kendala dalam menganalisis dampak jangka panjang dari sistem pengendalian intern yang diterapkan. Selain itu, keterbatasan akses data dan dokumentasi yang komprehensif turut mempengaruhi kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel, memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam untuk mendapatkan interpretasi yang lebih mendalam serta akurat mengenai sistem pengendalian intern dalam organisasi Bea Cukai Indonesia.

REFERENSI

- Alfani, A., & Firmansyah, A. (2018). Pengendalian Internal pada Siklus Penerimaan Bea Masuk untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i2.287>
- Alminanda, P., & Marfuah. (2018). Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal*

- Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132.
<https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Awallya, D. A., Santosa, H. R., Salsabilla, R. A., & Sofyan, N. S. (2023). Analisis Penyeludupan Barang Tanpa Pengecekan Bea Cukai Pada Bisnis Internasional: Studi Kasus Impor Handphone Ilegal. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*, 1, 14–20.
- Beri, P. P. (2022). *Penanggulangan Penyelundupan Rokok Tanpa Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan)* [Diploma, Universitas Andalas].
<http://scholar.unand.ac.id/106924/>
- Estherina, I. (2024, November 14). Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rp 49 Miliar dalam Sepekan, Sri Mulyani Soroti Lonjakan Impor Tekstil Ilegal. *TEMPO*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-rp-49-miliar-dalam-sepekan-sri-mulyani-soroti-lonjakan-impor-tekstil-ilegal--1168058>
- Fathah, R. N. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 198.
<https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2079>
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2550>
- Hakim, A. R., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada CV. Manik Arsa. 12(2), 529–537. <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i2.45082>
- Hanun, N. R., & Ningrum, S. (2024). Posisi Strategis Internal Audit untuk Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 2(2), 17-25.
<https://doi.org/10.61754/juralinus.v2i2.117>
- Junjunan, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, Moh. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
<https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>
- Junjunan, M. I., Nawangsari, A. T., & Hanun, N. R. (2021). New Normal: Learning from Home, the Availability of Information Technology and e-Learning Implementation as a Determinant of Accounting Students' Understanding. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 66–84.
<https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.30897>
- Kurniawan, D., & Firdiansyah, A. (2022). Menjaga Daerah Pabean Indonesia dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal dengan Teknik Asesmen Risiko. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 6(2), 284–303. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1774>
- Laksana, G. B. A., Putra, G. P. S. S., Jayantara, P. M., & Badriyah, S. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan yang Berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(2).
<https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19959>
- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Permata, N. R., & Dethan, M. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Maumere. *Jurnal Akuntansi*, 9.
- Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.223>
- Riyanita, A. G., & Widiastuti, H. (2020). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 115–128.

- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Simorangkir, D. S., & Firmansyah, A. (2017). Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 81-98.
- Siregar, Y. F., & Sibarani, P. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 8(2), 2298-2308.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss2.2022.1383>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.